



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Kasus penipuan keuangan, komisi XI puji OJK lindungi nasabah
Tanggal	: Minggu, 25 Januari 2026
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Kasus Penipuan Keuangan

Komisi XI Puji OJK Lindungi Nasabah

SENAYAN memuji keberhasilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dalam mengembalikan dana masyarakat dari berbagai kasus penipuan keuangan sebesar Rp 161 miliar. Sementara, total kerugian masyarakat dari berbagai kasus penipuan mencapai Rp 9,1 triliun.

"Angka ini (Rp 161 miliar) harus ditingkatkan, jangan sampai dana masyarakat sebesar Rp 9,1 triliun itu hilang begitu saja," tegas Habib Idrus dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Diketahui, OJK telah membantu mengembalikan dana senilai Rp 161 miliar kepada masyarakat yang menjadi korban scam atau penipuan keuangan. Pengembalian dana ini dilakukan melalui Indone-sia Anti-Scam Centre (IASC).

Habib Idrus melanjutkan, hingga saat ini telah tercatat sebanyak 432.637 laporan penipuan (scam) yang merugikan masyarakat lintas lapisan sosial. Disebutkan, ada tiga jenis penipuan utama yang paling banyak menimpak masyarakat. Yaitu, pinjaman online (pinjol) ilegal, penipuan digital berbasis phishing, dan One-Time Password (OTP), serta investasi bodong dan robot trading.

Sedangkan yang paling banyak menimpak masyarakat bawah adalah pinjol ilegal. "Dampaknya bukan hanya utang, tapi juga penyebaran data pribadi secara

masif," ujar politikus PKS ini.

Menurutnya, literasi keuangan yang ada saat ini masih belum cukup untuk menghadapi masifnya kejahatan digital. Karena itu, perlu adanya kampanye nasional yang lebih agresif dan masif untuk melindungi masyarakat. Sebab pinjol legal saja sering bermasalah, apalagi yang ilegal. "Ini perlu kampanye masif dari Pemerintah dan DPR agar masyarakat benar-benar terlindungi," desak dia.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi yang kerap dimanfaatkan untuk penipuan, impersonasi, hingga pemerasan digital. Data pribadi ini dimanfaatkan secara masif, bukan hanya untuk pinjol ilegal, tapi juga untuk impersonasi. "Bahkan sudah ada anggota DPR yang menjadi korban. Ini bahaya," tandasnya.

Dengan itu, diperlukan penguatan sistem autentifikasi digital yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat. Caranya autentifikasi tidak hanya wajah, tapi ditambah dengan biometrik lain seperti mata. "Ini bisa menyelamatkan banyak orang," saran dia.

Ia juga menyoroti soal investasi bodong dan robot trading. Kinerja Indonesia Anti-Scam Center (IASC) masih perlu di-pertukar dengan indikator kinerja yang jelas. Sebetulnya IASC ini adalah gabungan dari banyak ke-

IDROSALJUFI.COM



Habib Idrus

menterian yang harusnya lebih powerful. "Saya belum melihat Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, sementara penyelamatan dana masih jauh dari harapan," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mendorong OJK untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) secara cepat, transparan, dan terstandar. Tentunya tetap berorientasi pada perlindungan konsumen serta integritas pasar.

"Tujuannya untuk menciptakan ekosistem yang sehat, efisien, dan berkelanjutan," ujar Fauzi dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Dia bilang, penguatan regulasi

dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab. "Regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko," kata dia.

Fauzi menambahkan, pengawasan yang kuat dan responsif sangat dibutuhkan, terutama untuk menekan praktik ilegal dan potensi penipuan di sektor aset kripto. "Kami ingin mempercepat penyelesaian kasus fraud di IAKD secara cepat dan tepat dengan melibatkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal untuk memblokir aktivitas exchanger dan pihak lain yang tanpa izin OJK," tegasnya.

Komisi XI DPR, lanjutnya, juga mendorong OJK untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten promosi investasi aset kripto di media sosial, khususnya yang dilakukan oleh influencer yang belum tersertifikasi. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya preventif dan mitigasi risiko terhadap modus penipuan berkedok investasi.

Selain itu, Fauzi memekankan perlunya perluasan program edukasi dan literasi IAKD kepada masyarakat. Dengan itu, OJK didorong mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan inovatif. "Harapan-

nya agar pemahaman publik terhadap risiko dan peluang aset keuangan digital semakin meningkat," harap dia.

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widysari Dewi mengungkapkan, kejahatan scam kini telah berkembang menjadi jaringan lintas negara dengan pola yang semakin kompleks. Karena itu, kejahatan uang tidak boleh dibatalkan dan korban tidak boleh dibarkan sendirian.

"Kita melihat bagaimana kejahatan ini terus berevolusi dan ini bukan hanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) di negara kita," ujar Friderica di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Friderica mengungkap berdasarkan data OJK pada periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 432.637 laporan pengaduan masuk ke IASC. Dari laporan tersebut, ada 721.101 rekening yang dilaporkan terkait aktivitas penipuan, dan 397.028 rekening di antaranya telah berhasil diblokir.

Total kerugian masyarakat akibat kejahatan scam yang dilaporkan mencapai Rp 9,1 triliun. Sementara itu, dana yang berhasil diamankan atau diblokir oleh sistem IASC tercatat sebesar Rp 436,88 miliar. ■ TIF